PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Sabtu Tanggal: 21 September 2019 Halaman: 8

SOAL KELANJUTAN PROYEK SAH

Pemkot Yogya Tunggu Surat Tertulis KPK

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih menunggu surat tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kelanjutan proyek Saluran Air Hujan (SAH) Supomo yang sempat berhenti. Tindakan itu dilakukan karena Pemkot ingin mengetahui tindakan apa yang bisa dilakukan untuk merecovery agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Sampai saat ini kami masih menunggu surat tertulis atau fatwa dari KPK. Memang kami sempat ditanya oleh *Ngarsa Dalem* (Sultan HB X) mengenai kelanjutan proyek tersebut lantaran ada beberapa warga yang mengeluhkan terganggunya akses di dekat proyek SAH ini," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti seusai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Jumat (20/9).

Haryadi mengungkapkan, Sultan sempat mengharapkan agar segera ada tindak lanjut dari Pemkot Yogyakarta menyusul terhentinya proyek SAH sejak beberapa waktu lalu. Tindak lanjut berkaitan proyek SAH itu perlu dilakukan karena banyak keluhan dari warga. Walaupun sebenarnya untuk mengatasi itu, bisa saja perusahaan pelaksana proyek diputus kontrak kemudian ada lelang lagi dan pekerjaan dilaksanakan. Namun, pihaknya tidak mau melakukan hal itu, sebelum ada keputusan (kejelasan) resmi dari KPK.

"Prinsipnya kami masih menunggu fatwa dari KPK bagaimana. Apaknh nantinya mau putus kontrak lalu dikerjakan atau apalah. Yang penting proyek harus jalan terus itu. Kan yang dicekal orangnya bukan kemudian proyeknya berhenti, kira-kira begitu, jadi kita tunggu saja surat tertulis dari KPK,"ungkap Haryadi.

Sementara itu Sekda DIY Gatot Saptadi menyampaikan agar Pemkot Yogyakarta lebih berhati-hati terutama hukum kontrak dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur berkaca dari temuan dari KPK beberapa waktu lalu. Walikota Yogyakarta ingin mendapatkan fatwa jawaban tertulis dari KPK harus seperti apa nantinya.

" Kita semua harus berhati-hati jika ada permasalahan seperti itu tentunya dari sisi hukum kontraknya. Kalau bahasa enaknya, mau ditutup bisa saja dan langsung selesai atau putus kontrak. Namun tetap harus berhati-hati, sehingga Pemkot Yogyakarta ingin mendapatkan jawaban tertulis dari KPK perihal proyek yang tengah tersandung permasalah tersebut," papar Gatot.

Pemda DIY mendukung upaya Pemkot Yogyakarta untuk minta arahan kepada KPK.

" Kita tidak tahu, maka harus KPK yang memberikan keterangan yang di OTT tersebut perorangan atau perusahaan sehingga Pak Walikota hati-hati. Karena yang melakukan OTT adalah KPK, maka Pemkot Yogyakarta minta fatwa dari KPK boleh terus atau tidak proyeknya," tandasnya.

(Ria/Ira)-d

Tin
☐ Untu
☐ Untu
☐ Jum
Kepala
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005